



KETIMPANGAN DISTRIBUSI KIP-K DAN NARASI KEADILAN SOSIAL: TINJAUAN FILSAFAT POLITIK SERTA ANALISIS TEKS KEBIJAKAN

Vember Tri Tejeki Sitanggang¹, Violetta Olga Putri Nadely², Esmeralda Br Sitohang³, ValenTina Pinem⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: sitanggangvember@gmail.com

© Vember Tri Tejeki Sitanggang dkk, 2026

Abstract

This study analyzes the distributional inequality of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) program and the social justice narrative in higher education policy in Indonesia. The KIP-K program aims to expand access to education for students from low-income families as an implementation of the principle of social justice. This research employs a qualitative approach with policy text analysis through document studies of official documents and related literature. The results show that, normatively, the KIP-K policy emphasizes equitable access to education and social justice. However, in practice, challenges such as mis-targeted recipients, limitations in economic data verification, and unequal access to information still exist. These findings indicate a gap between policy narratives and their implementation in the field. Therefore, improvements in transparency, data accuracy, and oversight are necessary to ensure that the KIP-K program is implemented more fairly and effectively.

Keywords: KIP-K, social justice, education policy, text analysis

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketimpangan distribusi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) serta narasi keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Program KIP-K bertujuan memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks kebijakan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan KIP-K menekankan pemerataan akses pendidikan dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan verifikasi data ekonomi, dan perbedaan akses informasi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, akurasi data, dan pengawasan untuk memastikan program KIP-K berjalan lebih adil dan tepat sasaran.

Kata kunci: KIP-K, keadilan sosial, kebijakan pendidikan, analisis teks

Pendahuluan

Indonesia menekankan prinsip keadilan sosial sebagai salah satu nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang tercantum secara eksplisit dalam sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun tempat tinggal. Dalam praktiknya, prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui berbagai kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, termasuk pendidikan.

Pendidikan dianggap sebagai sarana penting untuk meningkatkan kemajuan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai bantuan pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan. Salah satu kebijakan strategis adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu, sebagai bentuk implementasi keadilan sosial dalam pendidikan (Wayes, 2024).

Secara konseptual, KIP-K merupakan komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial melalui perluasan kesempatan pendidikan. Namun, implementasinya sering menghadapi kendala, terutama terkait distribusi bantuan yang belum merata dan kurang tepat sasaran (Khairunnisa dkk., 2024). Beberapa mahasiswa yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan kesulitan mengakses program ini. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan sosial benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketimpangan ini tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga memunculkan perdebatan tentang makna keadilan, tanggung jawab pemerintah, dan transparansi kebijakan publik.

Dari perspektif filsafat politik, keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Analisis distribusi KIP-K melalui lensa filsafat politik memungkinkan pemahaman apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip keadilan sosial sebagai landasan ideologis negara. Selain itu, persoalan keadilan sosial dalam program KIP-K dapat dianalisis melalui kajian bahasa, khususnya melalui analisis teks kebijakan.

Bahasa dalam dokumen kebijakan tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi administratif, tetapi juga sebagai sarana membangun narasi, legitimasi, dan makna terhadap suatu kebijakan publik. Analisis teks kebijakan penting untuk memahami bagaimana konsep keadilan sosial dibentuk, dijelaskan, dan disampaikan dalam dokumen resmi pemerintah. Pilihan kata, struktur kalimat, dan istilah yang digunakan mencerminkan nilai dan tujuan tertentu yang ingin disampaikan pembuat kebijakan (Wibowo, 2022; Rahman, 2023).

Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek administratif, ekonomi, atau kebijakan pendidikan secara umum, sementara studi yang menghubungkan distribusi KIP-K dengan konsep keadilan sosial dari perspektif filsafat politik dan analisis bahasa masih terbatas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan distribusi KIP-K dalam kerangka keadilan sosial serta memahami bagaimana narasi keadilan sosial dibangun dalam teks kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kajian kebijakan pendidikan, studi bahasa Indonesia terkait analisis wacana kebijakan publik, dan pemahaman mengenai hubungan antara bahasa, kebijakan, dan nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik pemerintahan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks kebijakan untuk memahami secara mendalam fenomena ketimpangan distribusi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) serta konstruksi narasi keadilan sosial dalam dokumen kebijakan pendidikan (Sugiyono, 2021). Sumber data penelitian meliputi dokumen kebijakan terkait KIP-K, seperti peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan program, serta dokumen resmi dari kementerian terkait, didukung oleh laporan penelitian dan kajian akademik yang membahas implementasi program di berbagai daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dokumen dan literatur yang relevan untuk memperoleh informasi mengenai isi kebijakan, tujuan program, serta narasi yang digunakan untuk menjelaskan program KIP-K kepada masyarakat (Creswell, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis teks kebijakan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial, membaca secara mendalam dokumen kebijakan, menafsirkan istilah dan narasi terkait pemerataan pendidikan, serta menafsirkan makna yang terkandung dalam bahasa kebijakan tersebut. Tahapan analisis mengikuti prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Miles & Huberman, 2020). Metode ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan secara jelas bagaimana narasi keadilan sosial dibangun dalam teks kebijakan KIP-K serta bagaimana ketimpangan distribusi bantuan pendidikan dapat dipahami melalui perspektif filsafat politik dan analisis bahasa Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Keadilan sosial dalam filsafat politik menekankan distribusi sumber daya yang adil dan kesempatan yang setara bagi setiap individu, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sarana mobilitas sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif John Rawls, keadilan menuntut adanya prioritas bagi kelompok yang kurang beruntung agar tercapai pemerataan kesempatan, sehingga kebijakan pendidikan yang berpihak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu merupakan implementasi prinsip keadilan distributif.

Di Indonesia, ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah signifikan. Faktor ekonomi, geografis, dan keterbatasan fasilitas pendidikan berkontribusi terhadap kesenjangan ini (Pugu, Elmiwati, & Rukimin, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan tidak hanya terkait kebijakan formal, tetapi juga tergantung pada implementasi di lapangan. Kebijakan pendidikan yang inklusif dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial (Sarjito, 2024).

Dalam konteks pendidikan tinggi, keadilan sosial menjadi dasar normatif bagi pemerintah dalam merancang program bantuan pendidikan. Program pembiayaan pendidikan tinggi seharusnya menjamin bahwa mahasiswa dari keluarga kurang mampu memiliki akses yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan masih belum merata dan hambatan struktural membatasi akses kelompok rentan (Wilfridus, Ahmad, & Rochimah, 2024).

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan kebijakan afirmatif pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Program ini meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi serta mengurangi

kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi (Irawan, Dwiyantri, & Deswara, 2023). Program KIP-K juga terbukti berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan memperluas kesempatan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu (Ningsih & Hasbiah, 2024).

Meskipun demikian, implementasi program KIP-K menghadapi berbagai tantangan. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan menjadi persoalan utama, di mana beberapa mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan tidak memperoleh akses, sedangkan sebagian mahasiswa mampu tetap menerima bantuan (Khairunnisa dkk., 2024). Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatif, tetapi juga oleh mekanisme distribusi, validitas data penerima, dan pengawasan pelaksanaan program.

Ketimpangan distribusi KIP-K juga dipengaruhi oleh perbedaan akses informasi dan kapasitas administrasi antar daerah. Mahasiswa dari daerah terpencil kesulitan memperoleh informasi terkait prosedur pendaftaran atau persyaratan program. Selain itu, data ekonomi keluarga yang tidak selalu akurat dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam penentuan penerima bantuan (Pugu, Elmiwati, & Rukimin, 2024; Wilfridus, Ahmad, & Rochimah, 2024). Hal ini menekankan pentingnya transparansi, akurasi data, dan pengawasan untuk menjamin prinsip keadilan sosial dalam implementasi program.

Analisis narasi dalam dokumen kebijakan KIP-K menunjukkan bahwa bahasa kebijakan menekankan akses pendidikan, pemerataan kesempatan, dan perhatian terhadap kelompok kurang mampu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah membangun legitimasi kebijakan dan menekankan prinsip keadilan sosial (Irawan, Dwiyantri, & Deswara, 2023). Namun, terdapat ketegangan antara idealitas kebijakan dan praktik implementasi, di mana hambatan struktural, administratif, dan sosial masih membatasi pemerataan akses pendidikan (Sarjito, 2024).

Dengan demikian, bahasa kebijakan berfungsi sebagai instrumen ideologis yang membentuk persepsi publik tentang keadilan dalam pendidikan. Efektivitas narasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi antara tujuan yang tertulis dalam dokumen dengan realitas implementasi di lapangan. Program KIP-K memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan sosial, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sistem distribusi yang transparan, akurat, dan berorientasi pada prinsip pemerataan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) secara normatif dirancang untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial melalui pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Analisis narasi kebijakan menunjukkan bahwa dokumen resmi menekankan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan kesempatan yang setara dalam pendidikan. Namun, implementasi program KIP-K menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan verifikasi data ekonomi, dan perbedaan akses informasi antarwilayah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan praktik pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak semua kelompok yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat secara optimal.

Efektivitas KIP-K sangat bergantung pada peningkatan transparansi proses seleksi, akurasi data penerima, dan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Perbaikan aspek-aspek tersebut penting untuk memastikan program dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar pembentukannya.

Daftar Pustaka

- [1] Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- [2] Irawan, D., Dwiyantri, S., & Deswara, M. I. (2023). Analisis kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan problematikanya dalam pemerataan pendidikan tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 12(2), 115–128.
- [3] Khairunnisa, N. J., Ni'am Ahmad, A., Raihan, M., Azri, A., & Fattah, A. A. (2024). Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 13(1), 27-49.
- [4] Khairunnisa, N. J., Sari, R., & Pratama, A. (2024). Prinsip keadilan dalam pendistribusian program KIP-K di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–58.
- [5] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- [6] Ningsih, D. U., & Hasbiah. (2024). Pengaruh beasiswa Kartu Indonesia Pintar terhadap kesenjangan sosial melalui aksesibilitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 67–78.
- [7] Pugu, M. R., Elmiwati., & Rukimin. (2024). Ketimpangan pendidikan di Indonesia: Studi kebijakan dan evaluasi inovasi untuk menjembatani perbedaan kelas sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 10(1), 21–34.
- [8] Rahman, A. (2023). Analisis wacana dalam kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap keadilan sosial. *Jurnal Bahasa dan Kebijakan Publik*, 5(2), 112–124.
- [9] Rawls, J. (2020). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge: Harvard University Press.
- [10] Sarjito, A. (2024). Implikasi kebijakan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 9(2), 89–101.
- [11] Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Suryadi, A. (2021). Ketimpangan akses pendidikan tinggi dan kebijakan bantuan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 6(1), 45–58.
- [13] Wayes, G. (2024). Suatu Kajian Teologis Mikha 6: 8 Terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Sebagai Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dan Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Penggerak*, 6(1), 171-204.
- [14] Wibowo, A. (2022). Bahasa kebijakan publik dan konstruksi narasi keadilan sosial dalam program pendidikan. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 40(2), 157–170.
- [15] Wilfridus, N., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2024). Evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi: Implikasi bagi kesetaraan sosial. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Sosial*, 11(1), 54–66.